Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 28148-28157

Analisis PDR, IPM dan Indikator Sosial sebagai Dasar Penyusunan Strategi Fiskal di Silawesi Tengah

Nur Fadillah[1], Dwi Farradila[2], Nina Yusnita Yamin[3] Andi Chairil Furqan[4] Betty[5]
[1-5]Program Pascasarjana Magister Akuntansi, Universitas Tadulako, Indonesia
Corresponding Author: Nur Fadillah, e-mail: nrfdllhaaaa@gmail.com

Published: Oktober, 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze Gross Regional Domestic Product (GRDP), the Human Development Index (HDI), and social indicators such as open unemployment, poverty, and literacy rates as a basis for developing appropriate fiscal strategies for regions in Central Sulawesi Province. The research method used is a descriptive quantitative approach using secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) in 2024. The analysis results reveal quite striking disparities, where regions such as Morowali have very high GRDP per capita due to the dominance of the industrial sector, but have not been accompanied by a commensurate increase in the HDI. Meanwhile, regions such as Parigi Moutong and Donggala still lag behind in economic and social terms. Palu City, as the provincial capital, recorded the highest HDI and literacy rates, but still faces significant unemployment problems. This phenomenon indicates that economic growth has not been able to automatically improve the quality of life evenly. Therefore, a more adaptive and responsive fiscal strategy is needed to address the characteristics of each region, with a focus on strengthening social infrastructure, equitable distribution of basic services, job creation, and optimizing local potential to encourage inclusive and sustainable development in Central Sulawesi.

Keywords: Gross Regional Domestic Product, Human Development Index, Poverty, Unemployment, Literacy Rate, Fiscal Strategy, Regions in Central Sulawesi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator sosial seperti tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan dan angka melek huruf sebagai dasar penyusunan strategi fiskal yang tepat bagi daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. Hasil analisis mengungkapkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok, di mana wilayah seperti Morowali memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi karena dominasi sektor industri, namun belum disertai dengan peningkatan IPM yang sepadan. Sementara itu, daerah seperti Parigi Moutong dan Donggala masih tertinggal dalam hal ekonomi dan sosial. Kota Palu, sebagai ibu kota provinsi, mencatat IPM dan tingkat melek huruf tertinggi, tetapi tetap dihadapkan pada permasalahan pengangguran yang signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu secara otomatis meningkatkan kualitas hidup secara merata. Oleh karena itu, diperlukan strategi fiskal yang lebih adaptif dan responsif terhadap karakteristik masing-masing daerah, dengan fokus pada penguatan infrastruktur sosial, pemerataan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan optimalisasi potensi lokal untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pengangguran, Angka Melek Huruf, Strategi Fiskal, Daerah di Sulawesi Tengah.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Indonesia merupakan salah satu agenda utama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang besar, disparitas pembangunan antar daerah, khususnya antara daerah maju dan daerah tertinggal, masih menjadi tantangan yang signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 60 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah tertinggal, yang ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta infrastruktur yang minim (BPS, 2023).

Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota, merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Meskipun kaya akan sumber daya alam, seperti hasil pertanian, perikanan, dan mineral, pengembangan ekonomi di Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai kendala. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi Tengah mencapai Rp 33,5 triliun, dengan pertumbuhan yang relatif lambat dibandingkan dengan rata-rata nasional (BPS, 2023). Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Tengah pada tahun yang sama tercatat sebesar 67,5, menunjukkan keterbatasan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pendapatan (BPS, 2023).

Tingkat pengangguran di Sulawesi Tengah juga menjadi perhatian, dengan angka mencapai 8,3% pada tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di angka 5,6% (BPS, 2023). Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja. Selain itu, tingkat angka buta huruf di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi, dengan sekitar 3,2% dari populasi dewasa tidak mampu membaca dan menulis (BPS, 2023). Angka ini mencerminkan masalah pendidikan yang masih menjadi salah satu faktor penyebab keterbelakangan di daerah ini.

Infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi kendala utama dalam pengembangan ekonomi. Banyak kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah yang belum terhubung dengan baik melalui jaringan transportasi yang efisien, yang menghambat mobilitas barang dan orang. Hal ini mengurangi daya tarik investasi yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor ekonomi,terhadap klasifikasi daerah di Sulawesi Tengah agar dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Faktor-faktor ekonomi, seperti PDRB, IPM, tingkat pengangguran, dan tingkat angka melek huruf, berperan penting dalam menentukan status klasifikasi daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa daerah dengan IPM yang tinggi dan PDRB yang tumbuh baik cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Sukirno, 2021). Di sisi lain, tingkat pengangguran yang tinggi dan angka melek huruf yang signifikan dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, sehingga memperkuat status daerah tertinggal. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara faktor-faktor ekonomi ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder dari BPS serta laporan pemerintah daerah, penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan status klasifikasi daerah dalam konteks kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Fokus pada provinsi ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

LANDASAN TEORI

Teori Pembangunan Ekonomi

Teori pembangunan ekonomi menjelaskan proses di mana suatu negara atau daerah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Todaro dan Smith (2015), pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perbaikan dalam kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan distribusi pendapatan. Dalam konteks daerah tertinggal, faktor-faktor seperti Pendapatan Domestik

Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran dan angka melek huruf menjadi indikator penting untuk menilai kemajuan pembangunan.

Teori Fiscal Federalism

Menurut Oates (1972), konsep federalisme fiskal dalam sektor publik melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap tingkat pemerintahan memiliki otoritas untuk menentukan penyediaan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat yang dilayaninya. Martinez-Vazquez et al. (2017) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berkaitan dengan pengaturan sektor publik dan penciptaan peluang untuk pertumbuhan serta peningkatan kesejahteraan. Pendekatan tata kelola yang terdesentralisasi dapat memperkuat kepercayaan terhadap kebijakan publik dan membentuk dasar untuk konsensus kebijakan yang lebih luas. Teori federalisme fiskal klasik, seperti yang dikemukakan oleh Hayek (1945), menekankan manfaat efisiensi dalam alokasi sumber daya melalui desentralisasi. Oates (1993) juga berpendapat bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan pemerintah pusat, sehingga lebih efektif dalam menyediakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayahnya (Wibowo, 2008). Pepinsky & Wihardja (2011) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperkuat kebijakan regional yang inovatif dalam menanggapi permintaan pasar, sehingga menarik investasi. Namun, perbedaan kapasitas fiskal antar daerah dapat memengaruhi distribusi tenaga kerja dan modal dalam proses produksi, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakefisienan dalam alokasi dana transfer (Aritenang, 2019). Oleh karena itu, alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang ditujukan khusus untuk belanja modal menjadi penting guna menjamin keseragaman standar minimum dalam penyediaan infrastruktur publik, seperti fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan jaringan transportasi antarwilayah. Dukungan keuangan dari pemerintah pusat dalam bentuk investasi infrastruktur memungkinkan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya secara signifikan (Zheng et al., 2015).Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan melakukan belanja daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal, dengan harapan bahwa anggaran yang diberikan dapat meningkatkan standar pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengelolaan pendapatan dan tata kelola pemerintahan yang efektif merupakan faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang mengukur pencapaian suatu negara atau wilayah dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diwakili oleh angka harapan hidup saat lahir; pendidikan dinilai melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; serta standar hidup tercermin dari pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan . Dengan menyatukan ketiganya dalam satu ukuran, IPM memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kualitas hidup manusia dibandingkan indikator ekonomi semata seperti PDRB (Sen, 1999). Dalam konteks wilayah tertinggal di Sulawesi Tengah, pemanfaatan data IPM menjadi penting dalam mengungkap kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta sumber daya ekonomi. Informasi ini krusial sebagai dasar perumusan strategi fiskal yang terarah dan efektif, sehingga program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat daerah tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran adalah ukuran yang menunjukkan proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan namun masih aktif mencari pekerjaan. Jika tingkat ini tinggi, hal tersebut kerap menandakan adanya persoalan struktural dalam perekonomian seperti minimnya investasi, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, atau kebijakan yang kurang efektif dalam mendorong penciptaan lapangan kerja (Blanchard, 2017). Di daerah tertinggal seperti Sulawesi Tengah, pengangguran dapat memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan. Analisis tingkat

pengangguran membantu memahami tantangan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja, yang esensial untuk strategi fiskal yang berfokus pada pertumbuhan inklusif.

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang didefinisikan berdasarkan pendapatan atau konsumsi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan multidimensi mencakup kekurangan dalam kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Di daerah tertinggal, kemiskinan sering kali terkait dengan kurangnya akses ke sumber daya, infrastruktur yang buruk, dan diskriminasi. Analisis tingkat kemiskinan membantu mengidentifikasi kelompok rentan dan merancang program intervensi yang efektif, yang memerlukan alokasi fiskal yang tepat (Ravallion, 2016).

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan indikator penting dalam menilai tingkat pendidikan di suatu daerah. Tingginya tingkat melek huruf menunjukkan tantangan dalam akses pendidikan berkualitas dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Freire, 1970). Dalam konteks Sulawesi Tengah, analisis terhadap angka buta huruf memungkinkan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling tidak terlayani. Upaya untuk menurunkan angka buta huruf harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas, termasuk peningkatan akses pendidikan dan program literasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan berbasis data sekunder. Penelitian ini mengolah data makroekonomi dan sosial yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, khususnya mencakup data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan serta Angka Huruf Melek di 13 kabupaten/kota. Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, yang mencakup penyajian distribusi data, perbandingan antarwilayah, serta penyajian visual dalam bentuk grafik. Selain itu, wilayah diklasifikasikan ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan masing-masing indikator yang dianalisis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola ketimpangan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi sebagai dasar empiris bagi penyusunan strategi fiskal daerah yang lebih terarah, adil, dan sesuai dengan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan anggaran daerah dapat lebih responsif terhadap realitas ketertinggalan yang dihadapi beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

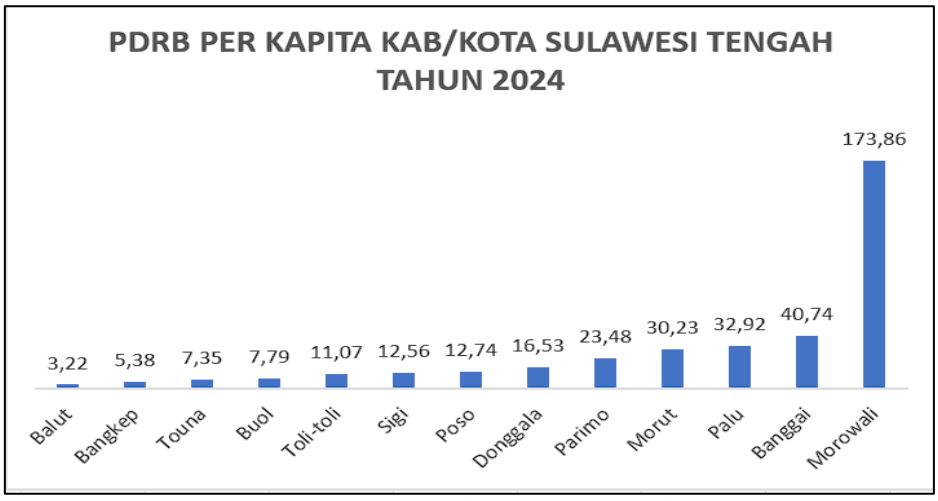
.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. STATISTIK DESKRIPTIF

1. Produk Domestik Regional Bruto

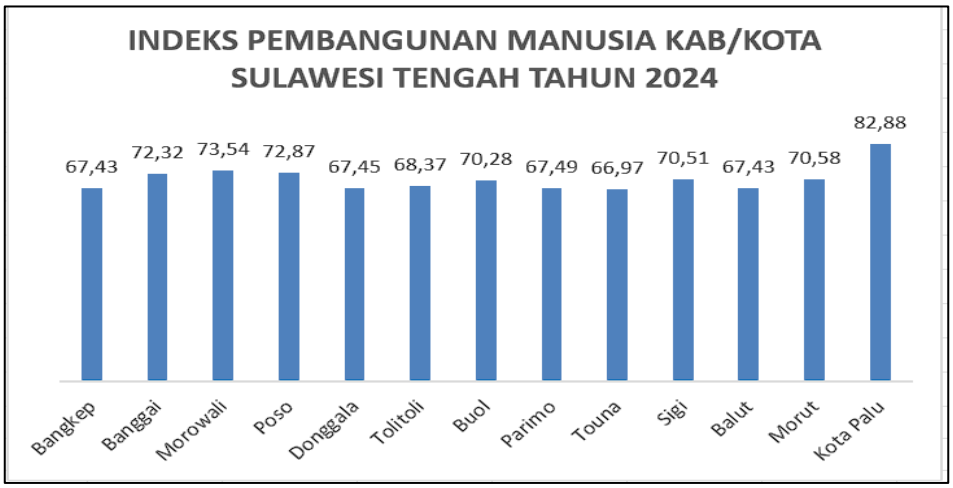
Pada tahun 2024, total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai Rp377,88 triliun. Nilai PDRB ADHB ini menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah, dengan rentang antara Rp3,22 triliun hingga Rp173,86 triliun. Kabupaten Morowali mencatatkan PDRB ADHB tertinggi sebesar Rp173,86 triliun, menjadikannya kontributor utama terhadap perekonomian provinsi. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Banggai dengan nilai Rp40,74 triliun, diikuti oleh Kota Palu di peringkat ketiga dengan PDRB ADHB sebesar Rp32,92 triliun. Sementara itu, Kabupaten Banggai Laut memiliki PDRB ADHB terendah di provinsi ini, yaitu sebesar Rp3,22 triliun. Perbedaan nilai PDRB antar daerah ini mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi yang bervariasi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sektor industri dominan, jumlah penduduk, dan potensi sumber daya alam di masing-masing wilayah.



Gambar 1. PDRB Per Kapita Kab/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2024

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 untuk setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tengah rata-ratanya mencapai Rp29,07 triliun. Hanya empat daerah yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai, Kota Palu, dan Kabupaten Morowali Utara yang mencatatkan PDRB di atas angka rata-rata tersebut. Selama 2024, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan pergeseran peringkat dalam daftar kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Misalnya, posisi Kabupaten Morowali Utara naik dari peringkat 6 pada tahun 2020 ke peringkat 4 pada 2024, Kabupaten Parigi Moutong turun dari peringkat 4 ke 5, dan Kabupaten Donggala bergeser dari peringkat 5 ke peringkat 6.

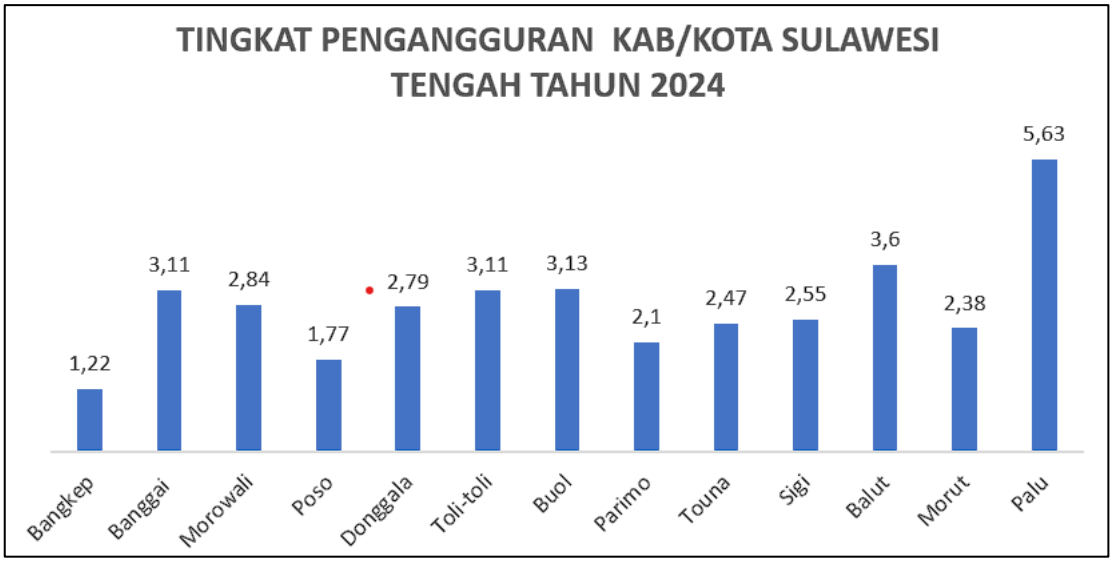
2. Indeks Pembangunan Manusia



Gambar 2. IPM Kab/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2024

Grafik ini menunjukkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (ekonomi). Berdasarkan grafik, terlihat adanya ketimpangan IPM antar daerah. Kota Palu memiliki IPM tertinggi sebesar 82,88, yang menunjukkan capaian pembangunan manusianya jauh lebih baik dibanding daerah lain. Di sisi lain, Kabupaten Tojo Una-una (Touna) memiliki IPM terendah yaitu 66,97, diikuti oleh Banggai Kepulauan (67,43), Donggala (67,45), dan Parigi Moutong (67,49). Ini mengindikasikan masih adanya daerah-daerah tertinggal yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan ekonomi lokal. Sebagian besar kabupaten berada pada kisaran IPM 67–73, yang masuk dalam kategori sedang, sementara hanya Kota Palu yang telah mencapai kategori tinggi. Temuan ini penting untuk menyusun strategi fiskal yang tepat, agar anggaran pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas hidup di daerah-daerah yang tertinggal.

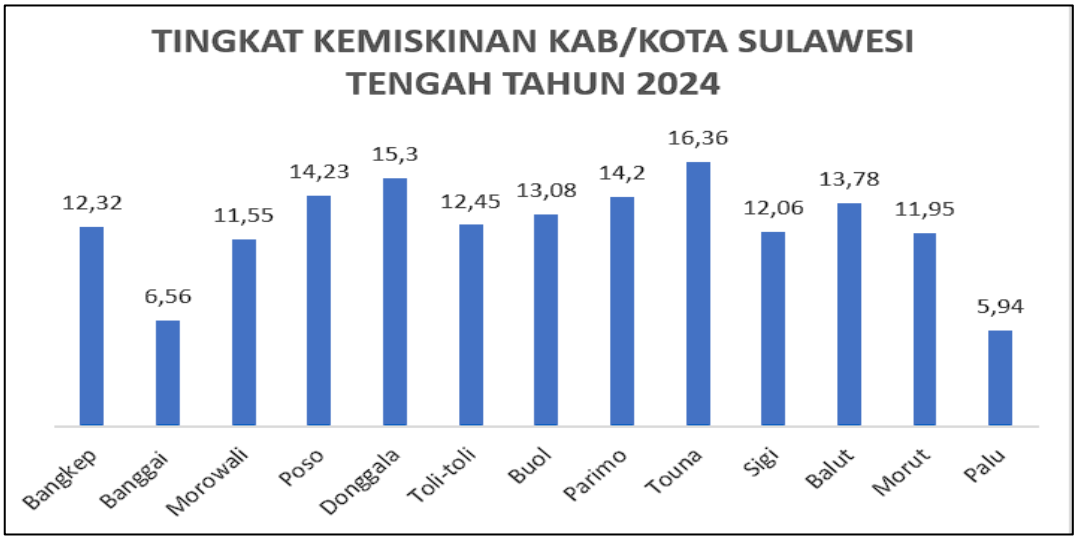
3. Tingkat Pengangguran Terbuka



Gambar 2. TPT Kab/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2024

Grafik ini menunjukkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. TPT menggambarkan persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan, sehingga menjadi indikator penting untuk menilai kesehatan pasar tenaga kerja dan efektivitas ekonomi lokal. Berdasarkan grafik ini, terlihat bahwa Kota Palu mencatat TPT tertinggi sebesar 5,63%, menunjukkan tingginya ketidaksesuaian antara ketersediaan pekerjaan dengan pertumbuhan angkatan kerja di wilayah perkotaan. Di sisi lain, Kabupaten Banggai Laut memiliki TPT terendah, yaitu hanya 1,55%, yang bisa menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil atau rendahnya partisipasi angkatan kerja formal. Kabupaten lainnya berada pada rentang sekitar 2% hingga 3,6%, dengan TPT menengah ke atas terlihat di Kabupaten Sigi (3,6%), Morowali Utara (3,13%), dan Poso serta Morowali (masing-masing 3,11%). Ketimpangan TPT ini memberikan sinyal bahwa strategi fiskal dan pembangunan daerah perlu disesuaikan dengan tantangan spesifik masing-masing wilayah, khususnya dengan memperkuat pelatihan tenaga kerja, pengembangan sektor padat karya, dan investasi berbasis potensi lokal untuk menurunkan pengangguran terbuka, terutama di pusat kota seperti Palu yang mengalami tekanan tinggi pada sektor ketenagakerjaan

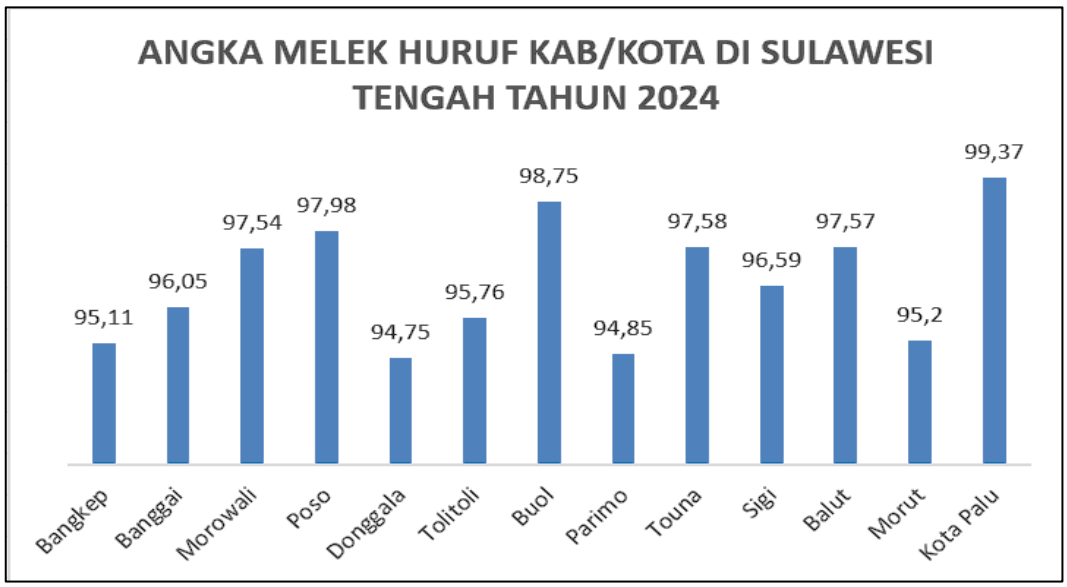
4. Tingkat Kemiskinan



Gambar 4. Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2024

Grafik ini menunjukkan tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024, yang diukur dalam persentase jumlah penduduk miskin terhadap total populasi. Secara umum, grafik ini menampilkan ketimpangan kesejahteraan antar daerah, di mana beberapa kabupaten masih mengalami tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Kabupaten Tojo Una-Una mencatat tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 16,36%, disusul oleh Donggala (15,3%), Poso (14,23%), dan Parimo (14,2%). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut masih mengalami kesenjangan akses terhadap pendapatan, layanan dasar, dan kesempatan ekonomi. Sementara itu, daerah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Palu (5,94%) dan Banggai (6,56%), yang mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk yang relatif lebih tinggi, didukung oleh urbanisasi, industrialisasi, dan infrastruktur yang lebih baik. Beberapa daerah lainnya berada pada kategori menengah, seperti Morowali (11,55%), Morut (11,95%), Balut (13,78%) Toli-toli (12,45%), Sigi (12,06%), Buol (13,08%) dan Bangkep (12,32%) Ketimpangan ini menegaskan pentingnya penyusunan strategi fiskal yang berbasis data, agar alokasi anggaran pemerintah daerah dapat difokuskan untuk menurunkan kemiskinan di daerah-daerah yang paling terdampak. Selain itu, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi perlu mendapat intervensi khusus melalui program pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perbaikan infrastruktur dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja.

5. Angka Melek Huruf



Gambar 5. Angka Melek Huruf Kab/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2024

Gambar 5 menampilkan data Angka Melek Huruf (AMH) di kabupaten/kota Sulawesi Tengah tahun 2024, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat literasi penduduk di wilayah ini tergolong tinggi, dengan seluruh daerah memiliki AMH di atas 94%. Kota Palu mencatat angka tertinggi sebesar 99,37%, mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor pendidikan dan akses yang merata terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah. Buol (98,75%), Poso (97,98%), Touna (97,58%), dan Balut (97,57%) juga menampilkan angka yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia dewasa telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis. Di sisi lain, Donggala (94,75%) dan Parimo (94,85%) menjadi dua daerah dengan capaian AMH paling rendah, yang meskipun masih tinggi dalam skala nasional, tetap menjadi indikator bahwa terdapat tantangan akses pendidikan dan literasi di beberapa wilayah tertinggal atau terpencil. Variasi ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan pendidikan yang lebih terfokus di daerah dengan capaian rendah, termasuk peningkatan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan program keaksaraan berbasis masyarakat, sehingga target pembangunan manusia yang inklusif dapat dicapai secara merata di seluruh Sulawesi Tengah.

B. Analisis Ketimpangan dan Permasalahan Pembangunan

Analisis terhadap PDRB, IPM, dan indikator sosial kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tahun 2024 menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang cukup tajam, mencerminkan masalah struktural dan spasial yang harus segera diatasi dalam penyusunan strategi fiskal daerah. Ketimpangan terlihat jelas dari perbedaan ekstrem dalam PDRB per kapita, di mana Kabupaten Morowali mencapai angka sangat tinggi (173,86 juta rupiah) karena dominasi industri pertambangan, sementara sebagian besar daerah lainnya masih berada di bawah 20 juta rupiah, menandakan rendahnya produktivitas dan peluang ekonomi di wilayah tersebut. Sebaliknya, data IPM mengungkapkan bahwa tingkat kualitas hidup masyarakat tidak selalu sejalan dengan kekuatan ekonomi daerah; contohnya, meskipun Morowali memiliki PDRB yang tinggi, capaian IPM-nya belum tergolong tertinggi, yang menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masih belum tercapai.. Kota Palu memiliki IPM dan angka melek huruf tertinggi, namun menghadapi tingkat pengangguran terbuka yang tinggi (5,63%), menandakan mismatch antara pendidikan dan dunia kerja. Tingginya angka kemiskinan turut memperdalam ketimpangan, terlihat dari kabupaten seperti Parigi Moutong dan Poso yang mencatat tingkat kemiskinan lebih dari 14%. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar serta minimnya kesempatan kerja yang produktif.Ketimpangan horizontal antarwilayah ini menciptakan tekanan sosial dan ekonomi yang memerlukan pendekatan kebijakan fiskal yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan melalui belanja publik yang berpihak kepada wilayah tertinggal, penguatan kapasitas SDM, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan inklusif.

C. Ahli Strategi Fisikal untuk Daerah Sulawesi Tengah

Berdasarkan temuan ini, arah strategi fiskal yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Fiskal Berbasis Keadilan dan Inklusivitas
    - Alokasi dana transfer daerah harus memperhatikan indikator kesejahteraan dan ketertinggalan, bukan hanya berdasarkan luas wilayah atau jumlah penduduk. Daerah dengan IPM dan PDRB rendah serta kemiskinan tinggi seperti Bangkep, Touna, dan Balut harus menjadi prioritas dalam dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID).
2. Penguatan Sektor Produktif Lokal
    - Fokus anggaran pada peningkatan kapasitas produksi masyarakat lokal melalui subsidi pertanian, nelayan, dan UMKM, terutama di daerah dengan ekonomi lesu tapi tenaga kerja besar seperti Parimo dan Poso.
3. Investasi pada SDM dan Infrastruktur Dasar
    - Perluasan belanja modal untuk akses pendidikan dan kesehatan di daerah dengan IPM rendah (misal: Donggala, Bangkep), dan peningkatan konektivitas antarwilayah untuk membuka pasar dan layanan sosial di wilayah tertinggal.
4. Reformasi Tata Kelola Dana Tambang
    - Wilayah kaya sumber daya seperti Morowali dan Banggai perlu strategi redistribusi hasil pertambangan melalui skema DBH (Dana Bagi Hasil) yang dikaitkan dengan indikator sosial—agar kekayaan mineral berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM.
5. Penguatan Ekonomi Kota Penyangga
    - Palu sebagai pusat pertumbuhan perlu didorong menjadi lokomotif ekonomi regional, dengan strategi fiskal yang mendukung pengembangan kawasan metropolitan dan integrasi ekonomi dengan kabupaten sekitar seperti Sigi dan Donggala.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta indikator sosial seperti tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan angka melek huruf di kabupaten/kota Sulawesi Tengah tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan pembangunan yang cukup mencolok antarwilayah. Kota Palu menampilkan kinerja unggul dengan pencapaian tertinggi dalam IPM, tingkat melek huruf, dan PDRB per kapita, yang mencerminkan

kemajuan dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Namun demikian, kota ini masih menghadapi tantangan serius berupa tingginya tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, Morowali menunjukkan PDRB per kapita yang sangat tinggi berkat sektor industri ekstraktif, namun capaian IPM-nya tidak sebanding, menandakan bahwa lonjakan ekonomi tidak sepenuhnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, daerah seperti Parigi Moutong dan Poso mengalami tingkat kemiskinan dan IPM yang rendah, menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam penyusunan strategi pembangunan. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata dan belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara luas. Oleh karena itu, strategi fiskal ke depan harus diarahkan pada pemerataan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur dasar, serta penciptaan lapangan kerja produktif yang inklusif. Diperlukan pula optimalisasi belanja publik yang responsif terhadap indikator sosial serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat tercapai dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tengah.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan variabel dengan memasukkan indikator ketimpangan pendapatan (seperti *Gini Ratio*) serta kualitas belanja daerah (efektivitas dan efisiensi anggaran) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan dampak kebijakan fiskal terhadap pembangunan daerah tertinggal. Selain itu, penggunaan metode kuantitatif lanjutan seperti analisis regresi *panel* atau *spatial econometrics* dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan kausal antara variabel makroekonomi dan sosial terhadap kondisi fiskal daerah. Penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan aspek dinamika waktu (*time series*) untuk mengamati perubahan tren indikator dari tahun ke tahun, serta memperbandingkan dengan provinsi lain sebagai pembanding regional. Terakhir, pendekatan partisipatif melalui survei atau wawancara dengan pemangku kepentingan lokal (pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha) juga dapat dipertimbangkan agar hasil analisis lebih aplikatif dan kontekstual.

REFERENSI

Aritenang, A. F. (2019). *Fiscal decentralization and infrastructure provision in Indonesia: An empirical analysis*. Journal of Regional and City Planning, 30(2), 151–166.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Sulawesi Tengah dalam angka 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics* (7th ed.). Pearson Education.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.

Hayek, F. A. (1945). *The use of knowledge in society*. The American Economic Review, 35(4), 519–530.

Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). *The impact of fiscal decentralization: A survey*. Journal of Economic Surveys, 31(4), 1095–1129.

Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Oates, W. E. (1993). *Fiscal decentralization and economic development*. National Tax Journal, 46(2), 237–243.

Pepinsky, T. B., & Wihardja, M. M. (2011). *Decentralization and economic performance in Indonesia*. Journal of East Asian Studies, 11(3), 337–371.

Ravallion, M. (2016). *The economics of poverty: History, measurement, and policy*. Oxford University Press.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. New York: Alfred A. Knopf.

Sukirno, S. (2021). *Makroekonomi: Teori pengantar* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education Limited.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education Limited.

Wibowo, A. (2008). *Desentralisasi fiskal dan pelayanan publik di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Zheng, S., Kahn, M. E., Sun, W., & Luo, D. (2015). *Incentivizing China's urban mayors to mitigate pollution externalities: The role of the central government and public environmentalism*. Regional Science and Urban Economics, 50, 93–103.